BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). SDA yang melimpah tersebut dapat menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dapat memakmurkan rakyatnya. Namun SDA pada kenyataannya belum diikuti dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini dikarenakan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, keberadaan suatu institusi pemerintah disamping harus mempunyai aparatur yang berkualitas atau SDM yang baik, harus pula mempunyai strategi bersaing yang baik. Kemampuan SDM yang berkualitas dapat menunjang pembangunan Bangsa Indonesia. Maka dari itu peran manajemen pemerintah sangatlah penting didalam suatu institusi pemerintahan.

Keberadaan daerah pada era otonomi daerah terbagi atas wilayah provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Peranan Pemerintahan daerah sangat penting dalam tercapainya pembangunan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini dimana daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan arah pembangunan sendiri. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas sangat dibutuhkan sehingga mampu berkompetisi dengan sektor swasta melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang efektif.

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan di daerah. Otonomi daerah agar terlaksana sesuai dengan tujuannya, perlu diberikan wewenang dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah berorientasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk fungsi pelayanan publik. Otonomi daerah didalam memberikan fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Semangat desentralisasi menghendaki pemberian pelayanan terbaik kepada publik yang lebih berorentasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat atau publik.

Pelayanan Pemerintahan daerah merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh mayarakat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus mewujudkan suatu pelayanan sistem informasi. Pelayanan sistem informasi dilakukan karena suatu keharusan terutama didalam Pemerintahan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja para aparatur. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam bidang Pemerintahan salah satunya digunakan untuk kelancaran komunikasi antar Lembaga-lembaga, Dinas, Instansi dan Badan. Komunikasi antar Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah serta bagi

masyarakat luas supaya terjalin suatu sistem kepemerintahan yang efektif, efisien serta cepat dalam melayani masyarakat luas. Teknologi sistem informasi mampu menyediakan ruang informasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimana pun secara mudah.

Penerapan *e-Goverment* merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam menjalankan aktivitasnya pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi sangat mempengaruhi pemerintahan dimasa modern terutama dalam melayani masyarakat, karena banyak aspek-aspek dan fungsi – fungsi Pemerintah konvensional (pemerintah yang berdasarkan kesepakatan) tersebut adalah:

> "Yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakat sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya). Inilah alasan lain mengapa pemerintah dipaksa untuk mengkaji fenomena yang ada, supaya dapat secara benar dan efektif mereposisikan/menempatkan peranan dirinya." (Indrajit, 2004:8)

Perkembangan zaman pada saat ini, semakin lama proses produksi hasil-hasil pertanian menjadi semakin bertambah kompleks dan terspesialisasi, sehingga pemasok (*supplier)* sektor bahan input pertanian memasuki suatu dimensi baru yang penting. Keberadaan mereka sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian. Dilain pihak, penghasilan konsumen semakin meningkat sehingga mereka menuntut pelayanan dan kualitas yang lebih baik dalam pembelian produk-produk bahan pangan. Kecendrungan ini terus berlanjut sehingga keberadaan sektor pertanian menjadi semakin penting karena tidak saja bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai jenis dan jumlah bahan input yang tepat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap bauran pemasaran (*marketing*

mix) yang tepat untuk produk, pada saat produk tersebut bergerak melalui sistem pengolahan bahan pangan sampai dengan ke konsumen akhir. (Firdaus, 2008:4)

Kemajuan teknologi dan informasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Pertanian yang berbasis pada pengguna teknologi komputer. Aplikasi teknologi ini diimplementasikan sebagai bentuk nyata pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Pertanian yang baik, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan informasi dan pengarahan kepada para masyarakat tentang pertanian.

Sistem informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama untuk menuju terciptanya sistem informasi yang optimal, efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat merupakan bentuk penyesuaian dalam rangka mewujudkan praktik pemerintah yang lebih efektif dan efisien, sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Informasi.

Dinas Pertanian menyelenggarakan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien diperlukan adanya pengelolaan berupa *website,* infrastruktur yang baik dan jaringan komputer yang baik serta pemeliharaan yang teratur dapat menunjang penyelenggaraan *e-Governmment* dan manajemen sistem informasi yang komprehensif dapat menunjang keberhasilan dinas dalam rangka memberikan layanan informasi yang optimal kepada seluruh pengguna data dan informasi.

Simtan adalah suatu sistem untuk memfasilitasi pelayanan di bidang pertanian misalnya mengembangkan sistem informasi di Jawa Barat, meningkatkan jejaring trafik data informasi antar stockheder di setiap Jawa Barat dan mempermudah pengguna tani dalam mengakses data informasi pertanian, mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Sistem Informasi Pertanian diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pelayanan publik, dan dapat mengembangkan aplikasi-aplikasi strategi yang baru.

Simtan dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi informasi pertanian dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi pertanian. Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: aplikasi informasi pertanian dibangun dalam rangka urusan pertanian diantaranya, Penanaman padi yang baik .

Bentuk aplikasi data dimasukan ke dalam komputer secara bertahap dan data tersebut masuk ke dalam pengolahan data informasi pertanian untuk diolah. Pengolahan data yang difasilitasi dengan aplikasi layanan informasi pertanian, pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya di bidang pertanian Provinsi Jawa Barat.

Lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan informasi sudah menerapkan pelayanan melalui Simtan. Pelayanan tersebut sudah diterapkan tetapi pelaksanaannya belum optimal, karena masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya permasalahan yang ada dalam

penerapan Sistem Informasi menggunakan teknologi adalah infrastruktur yang belum memadai terutama di dalam sistem informasi manajemen pertanian.

Akibatnya sistem informasi tersebut belum berjalan secara baik dan efektif. Penggunaan Simtan diharapkan dapat menjadi alat bantu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.**

1.2 Identifikaasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penelitian mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengorganisasian Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana penggerakan dan kepemimpinan Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat?

4. Bagaimana pengendalian Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penilitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk melihat dari proses implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui penggerakan dan kepemimpinan Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengendalian Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu :

1. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai implementasi simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang belum memadai di bidang pertanian.
2. Secara teoritis, Penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan roda Pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat salah satunya dengan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dikenal dengan sebutan *e-Government*, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.

Upaya mengembangkan pemerintahan yang berbasis *e-Government,* komputer serta sarana pendukung lainnya seperti alat pengolah data elektronik merupakan faktor penting. Kebijakan penerapan *e-Government* merupakan mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Kebijakan penerapan *e-Government* sangat tepat dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir sekarang ini.

Pengembangan *e–Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e–Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pengertian *e-Government* menurut Richardus Eko Indrajit adalah :

> "Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern Richardus Eko Indrajit) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan" (Indrajit, 2004:4-5).

Melalui *e-Government* dapat terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah, melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik, menuju *good governance*. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi *e-Government* diharapkan dapat merubah sistem pelayanan pada manajemen pemerintahan dan dapat dimanfaatkannya dengan baik.

Munculnya *e-Government* dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Aplikasi *e-Government* ini biasanya berupa penyediaan sumber informasi, khususnya informasi mengenai manajemen pertanian, khususnya dalam infrastruktur pada objek kebijakan sistem informasi pertanian yang di lakukan oleh dinas pertanian, berupa akses data-data dalam melayani publik cepat terlaksana dan penyampaian informasi kepada publik lebih akurat. Sehingga semua Pegawai harus bisa mengaplikasikan sistem ini dengan mudah, sehingga keterbukaan menjadi lebih efektif dan tidak adanya birokrasi yang berbelit belit.

Penggunaan teknologi secara elektronik dalam kenyataan dan prakteknya adalah pengolahan data dengan menggunakan jaringan komputer dan semua sarana pendukungnya dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoperasionalkan jaringan komputerisasi tersebut.

Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplimentasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*., yaitu :

> “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132). Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya :

1. Kondisi lingkungan
   Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi
   Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
   Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
   Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
   (Subarsono, 2005:101).

Sedangkan menurut Burch, implementasi sistem didefinisikan sebagai : "suatu implementasi yang terdiri dari rencana implementasi sistem dan pelaksanaan sistem yang menggambarkan tugas-tugas yanng diperlukan dalam pengimplementasian suatu sistem". (Burch, 1992:12)

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi biasanya menunjukan seluruh upaya perubahan melalui sistem baru. Sistem dibuat untuk memperbaiki atau meningkatkan pemprosesan informasi. Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan kedalam organisasi pengguna. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut dapat digolongkan gagal.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam:

> "Konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling.* Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnnya adalah menggoganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui (a) Implementasi strategi (b) pengorganisasian (c) penggerakan dan kepemimpinan (d) pengendalian. " (Nugroho, 2004:163)

Dengan adanya implementasi kebijakan menggorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Faktor – faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas :

Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :

a) Menyesuaikan struktur dengan strategi.
b) Melembagakan srategi.
c) Mengoperasionalkan strategi.
d) Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:

a) Desain organisasi dan struktur organisasi
b) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
c) Integrasi dan koordinasi
d) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
e) Hak, wewenang dan kewajiban
f) Pendelegasian
g) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
h) Budaya organisasi

Faktor yang ketiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsi dasar *good governance*. Dengan konsep-konsepnya:

a) Efektivitas kepemimpinan
b) Motivasi
c) Etika
d) Mutu
e) Kerja sama tim
f) Komunikasi organisasi
g) Negoisasi

Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:

a) Desain pengendalian
b) Sistem informasi manajemen dan
c) Monitoring
d) Pengendalian anggaran atau keuangan

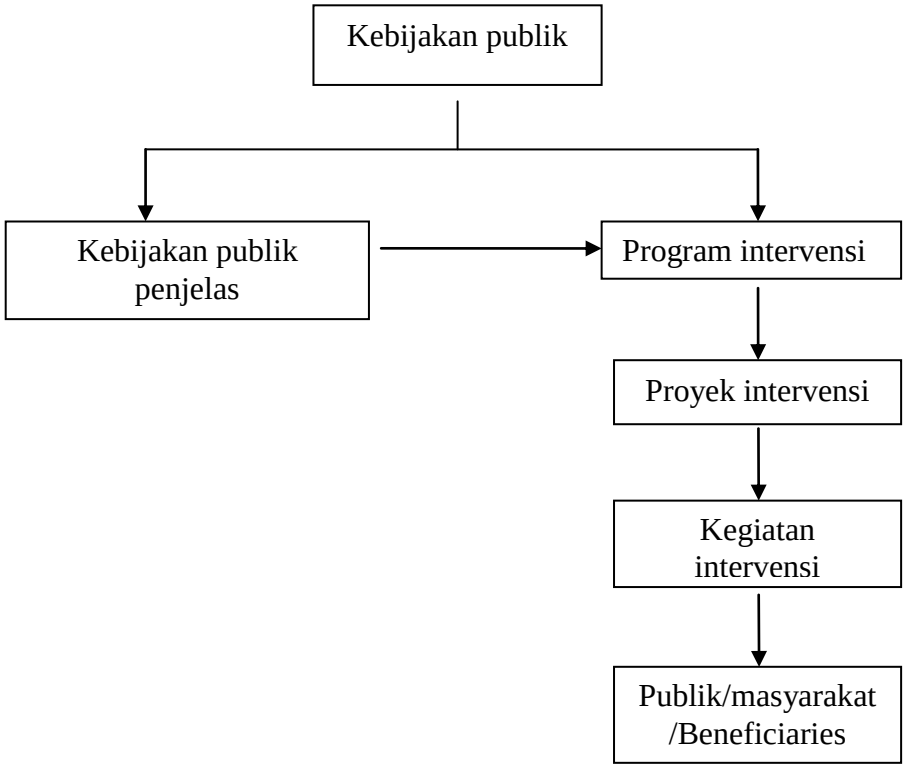
e) Audit
(Riant Nugroho, 2004:163)

Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan *platform* yang kompatibel bagi semua Departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas.

Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan *e -Government* melalui semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah. Untuk keperluan itu, pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan pengguna kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan *e-Government* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian Pegawai Negri Sipil di semua tingkat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1
Rangkaian Implementasi Kebijakan



Sumber :Nugroho (2004:159)

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14). Kebijakan penerapan *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan suatu tujuan dalam penerapan *e-Government* untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Menurut Carl Friendrich kebijakan adalah :

> Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (dalam Winarno, 2002:16).

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.

> "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Wahab, 2001:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan . M.Irfan Islamy juga mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Kebijakan adalah suatu program

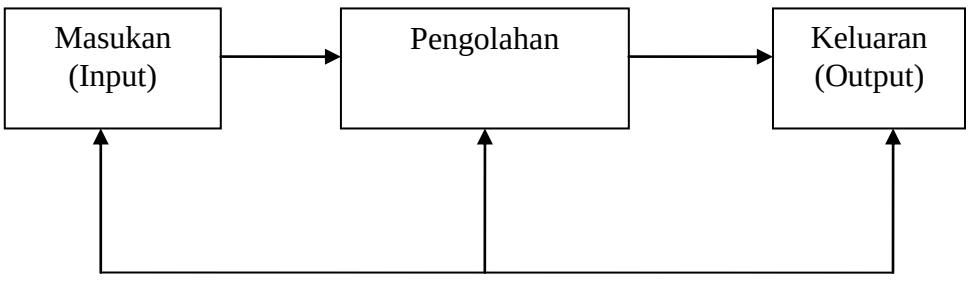
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14).

Selanjutnya hal yang sama juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementacion and policy,* yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan :

> "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi".
> (Mazmanian dan sebastier dalam Aguatino,2006:139)

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan. Murdick dan Ross mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama (Murdick dan Ross, 1993:6). Pandangan para ahli terhadap sistem berbeda – beda, mengatakan sistem terdiri dari unsur – unsur seperti masukan *(input)*, pengolahan *(processing)* serta keluaran *(output)* (Scott, 1996:69).

Gambar 1.2
Model Sistem



Sumber : Scott (1996:6)

Bagan diatas menunjukan bahwa sistem atau pendekatan sistem minimal harus mempunyai empat komponen, yakni masukan, pengolahan, keluaran dan balikan atau kontrol. Sementara Mc Leod mendefinisikan :

> Sistem sebagai kelompok elemen – elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama dalam mencapai tujuan akan tetapi secara umum proses yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah dengan mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output. (Mc Leod, 1995:14-18).

Sumber daya mengalir dari elemen input melalui elemen transformasi kepada elemen output dan untuk menjamin prosesnya maka dibutuhkan mekanisme kontrol. Dari uraian konsep – konsep mengenai sistem tersebut, Suradinata menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem dapat dilihat dari karakteristiknya, yakni:

1. Adanya komponen sistem (sub sistem) yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan yang mempunyai sifat – sifat sistem.
2. Terdapat batas sistem baik antar subsistem maupun antar sistem yang dikenal dengan lingkungan.
3. Lingkungan luar sistem adalah semua yang berada di luar sistem yang mempengaruhi operasional sistem.
4. Penghubung sistem adalah media antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber daya.
5. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai.
   (Suradinata, 1996:8-9)

Pengertian data dalam bukunya yang berjudul *Sistem:informasi Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*, menurut Wahyono yaitu: “Bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya”.(Wahyono,2004:2).

Sedangkan definisi informasi yang dikemukakan oleh Wahyono, yaitu:

> “Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan". (Wahyono,2004:3)

Suatu informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi mengambarkan kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan pengawasan hasil pengolahan tersebut.

Informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut dianggap.
b. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
c. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan".
(Mc Leod,2001:61)

Informasi yang berkualitas seperti yang dikemukakan di atas harus mempunyai empat ciri yang pertama yaitu suatu informasi harus akurat, akuratnya informasi karena telah melakukan pengujian dan apabila pengujian tersebut berhasil maka informasi tersebut dianggap data. Kedua suatu informasi harus tepat waktu, karena suatu informasi harus ada jika informasi tersebut diperlukan. Ketiga suatu informasi harus relevan, karena suatu informasi yang diberikan harus sesuai

dengan apa yang dibutuhkan dan yang keempat, adalah suatu informasi haruslah lengkap tidak boleh kurang, jika informasi tersebut kurang maka suatu informasi masih diragukan.

Setelah menguraikan tentang sistem, data dan informasi di atas, maka sistem informasi dapat disimpulkan menurut Kadir dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi*, yaitu :

> "Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan". (Kadir,2003:10)

Definisi di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi adalah sejumlah komponen yang saling berhubungan antara manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja, dan diproses data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan. Sistem informasi juga digunakan untuk mendukung didalam pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran efektivitas dalam suatu perusahaan.

Sistem informasi merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang lebih berguna bagi penerimanya. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil pengolahan tersebut.

Dalam suatu organisasi pemerintahan, baik instasi kota maupun provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu melibatkan kerja sama antar orang, selalu

diperlukan manajemen. Hal ini melandasi pemikiran manusia bahwa manajemen merupakan sesuatu hal yang penting untuk di pelajari dan dikembangkan.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah memungkinkan departemen-departemen untuk mengintegrasikan informasinya. Ketika pemerintah menyadari bahwa informasi yang dikumpulkan merupakan aset yang berharga, pemerintah dapat menggunakannya secara komersial dan mengubahnya menjadi komoditas yang bisa ditukar. Kasus ini, *Informati,Comunication, and Technology* (ICT) berfungsi sebagai medium untuk mentransfer informasi dari sumbernya ke pengguna atau ke pasar.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah dalam memberikan pelayanannya terhadap publik diterapkan simtan. Dinas Pertanian menerapkan simtan dari tahun 2007 sampai sekarang gunanya menerapkan simtan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dengan simtan diharapkan masyarakat lebih mudah dalam mencari informasi-informasi pertanian.

Simtan adalah sebuah model aplikasi elektronik berbetuk web yang berfungsi dalam pelaporan data pertanian untuk keperluan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini di buat berdasarkan untuk memudahkan informasi-informasi tentang pertanian.

Implementasi Kebijakan Simtan dalam pelaporan data pertanian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Sebagai sarana pelaporan data pertanian, maka penerapan kebijakan Simtan dalam pelaporan data pertanian

diharapkan dapat mampu memberikan laporan pertanian sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan semuanya.

Pengertian layanan atau pelayanan secara umum, menurut (Purwadarminta, 1996) adalah "menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain." Berdasarkan pendapat tersebut, layanan atau pelaynan merupakan suatu bentuk usaha yang menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang memerlukannya.

Berdasarkan yang dimaksud dengan pelayanan informasi adalah menyediakan segala kebutuhan yang berupa sebuah hasil dari pengolahan data dan digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan.

Simtan yang merupakan bagian dari hasil pengolahan data pertanian tentunya diharapkan memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik atau masyarakat. Menurut Sinambela di dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pelayanan Publik*, bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat".(Sinambela, 2006:5)

Pelayanan publik menurut definisi di atas dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini adalah pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Moenir dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, mengatakan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik dapat dilakukan dengan cara:

> "1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
> 2. Mendapatkan pelayanan secara wajar
> 3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih
> 4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang".
> (Moenir, 2006:47)

Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakatnya harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Pelayanan yang terbaik harus dilakukan dengan cara-cara seperti yang telah dikutif di atas dengan cara memberikan kemudahan dalam mengurus berbagai urusan supaya pelayanan yang dilakukan bisa berjalan dengan cepat, memberikan pelayanan secara wajar dan tidak berlebihan sesuai dengan keperluannya masing-masing, memberikan perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan dan bisa bersikap jujur.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak positif seperti yang dikutip dari H.A.S. Moenir dalam bukunya *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, antara lain:

> "1. Masyarakat menghargai kepada korps pegawai
> 2. Masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan
> 3. Masyarakat bangga kepada korps pegawai
> 4. Ada kegairahan usaha dalam masyarakat
> 5. Ada peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju segera tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila".
> (Moenir, 2006:47)

Pelayanan yang baik akan berdampak positif seperti yang diuraikan di atas, jika masyarakat menghargai kepada korps pegawai, masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan yang telah diberikan oleh para pelaksana, masyarakat akan

merasa bangga kepada korps pegawai, adanya kegairahan usaha dalam masyarakat, dan adanya peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju segera tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Muhamad Firdaus mengemukakan pengertian manajemen dalam bukunya *manajemen agribisnis* antara lain sebagai berikut:

Menurut George R Terry menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mmenentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lain.(Firdaus, 2008:23)

Marry Parker Follet memberikan batasan manajemen sebagai seni untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang-orang *(the art getting thing through people)*. Definisi ini memang sesuai dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana para manajer tidak melakukan sendiri tugas-tugas yang harus diselesaikan, tetapi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melakukannya.(Firdaus, 2008:23)

James A.F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen dalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Firdaus, 2008:24)

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengoganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan

pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Definisi-definisi di atas pula tampak ada tiga hal pokok dalam manajemen, yaitu sebagai berikut :

1. Ada tujuan yang hendak dicapai.
2. Tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan orang lain.
3. Kegiatan-kegiatan orang lain tersebut harus dibimbing dan diawasi.

Berdasar penjelasan yang tadi, dketahui bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan gejala-gejala, kejadian-kejadian, dajn keadaan-keadaan yang ada (*art teaches one know*). Sedangkan manajemen sebagai fungsi mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan suatu hal *(art teaches one to do)*mencapai tujuan yang nyata-nyata mendatangkan hasil atau manfaat.

Dalam berbagai buku atau tulisan, kita sering menjumpai pembagian pertanian kedalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Menurut Firdaus Muhamad dalam bukunya manajemen agribisnis, Pertanian dalam arti luas mencangkup :

a. Pertanian rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit,
b. Perkebunan, termasuk di dalamnya perkebunaan rakyat dan perkebunan besar
c. Kehutanan
d. Peternakan, dan
e. Pertanian.

Namun, di dalam praktik pembagian secara konvensional tersebut ternyata kurang konsisten dan tidak jarang menimbulkan kesulitan. Misalnya, perkebunan rakyat secara ekonomis juga dapat disamakan dengan pertanian rakyat karena perbedaannya hanya terletak pada macam komoditi atau hasilnya saja, yaitu tanaman bahan makanan bagi pertanian rakyat dan tanamnan perdagangan terutama bahan-bahan ekspor bagi perkebunan rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, manajemen pertanian yang dikutip dari Firdaus Muhamad dalam bukunya *manajemen agribisnis* adalah ilmu dan seni perencanaan, pengoganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan atas sumber daya, terutama didalam pertanian untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.(Firdaus, 2008:24)

Tujuan manajemen pertanian agar terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang pertanian sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang pertanian. Terselenggaranya manajemen pertanian secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanian.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berup jalan, air bersih dan telekomunikasi,secara

fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Karl Marx dalam kegunaan dalam aplikasi lain, *infrastruktur* dapat merujuk pada *teknologi informasi*, saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, atau kumpulan orang dengan kepentingan umum.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dan diarahkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur Simtan.
2. Simtan adalah suatu sistem untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan di bidang pertanian dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan informasi di Dinas pertanian Tanaman Pangan provinsi Jawa Barat.
3. Pelayanan informasi adalah menyediakan segala kebutuhan yang berupa sebuah hasil dari pengolahan data petanian oleh di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melalui Simtan.

4. Implementasi Simtan adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas pertanian dalam meningkatkan pelayanan informasi yang memberikan berbagai informasi pertanian salah satunya tentang infrastuktur pada objek kebijakan. Dalam mengukur suatu keberhasilan implementasi tersebut di lihat dalam indikator sebagai berikut:

    1) Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. Dalam hal ini implementasi kebijakan Simtan dalam meningkatkaan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut:

        a) Penyesuaian struktur dengan strategi merupakan implementasi kebijakaan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

        b) Pelembagaan strategi merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

        c) Pengoperasionalkan strategi merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

        d) Penggunaan prosedur merupakan memudahkan implementasi kebijakaan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi

tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

2) Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan adalah. Dan konsep-konsepnya:

a) Desain organisasi dan struktur organisasi merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

b) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

c) Integrasi dan koordinasi merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

d) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia` merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

e) Hak, wewenang dan kewajiban merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

f) Pendelegasian merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

g) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

h) Budaya organisasi merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

3) Penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsi dasar *good governance*. Dengan konsep-konsepnya:

a) Efektivitas kepemimpinan adalah tercapainya tujuan kepemimpinan Kepala Dinas Pertanian pada pelayanan informasi dalam implementasi kebijakan melalaui simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

b) Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak dalam hal ini kepala dinas pertanian dalam

implementasi kebijakan simtan untuk meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

c) Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. dalam hal ini kepala Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan simtan untuk meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

d) Mutu adalah kesesuaian dengan persyaratan dalam hal ini Kepala Dinas pertanian dalam implementasi kebijakan simtan untuk meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

e) Kerja sama tim merupakan implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

f) Komunikasi organisasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. dalam hal ini kepala Dinas pertanian dalam implementasi kebijakan melalaui simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

g) Negoisasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihal lawan dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak. dalam hal ini kepala Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi tentang infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

4) Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dengan konsep-konsepnya:

a) Desain pengendalian merupakan desain kebijakan yang harus dikendalikan dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi mengenai infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

b) Sistem informasi manajemen adalah pengembagan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi dalam hal ini kepala Dinas Pertania dalam meningkatkaan kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi mengenai infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

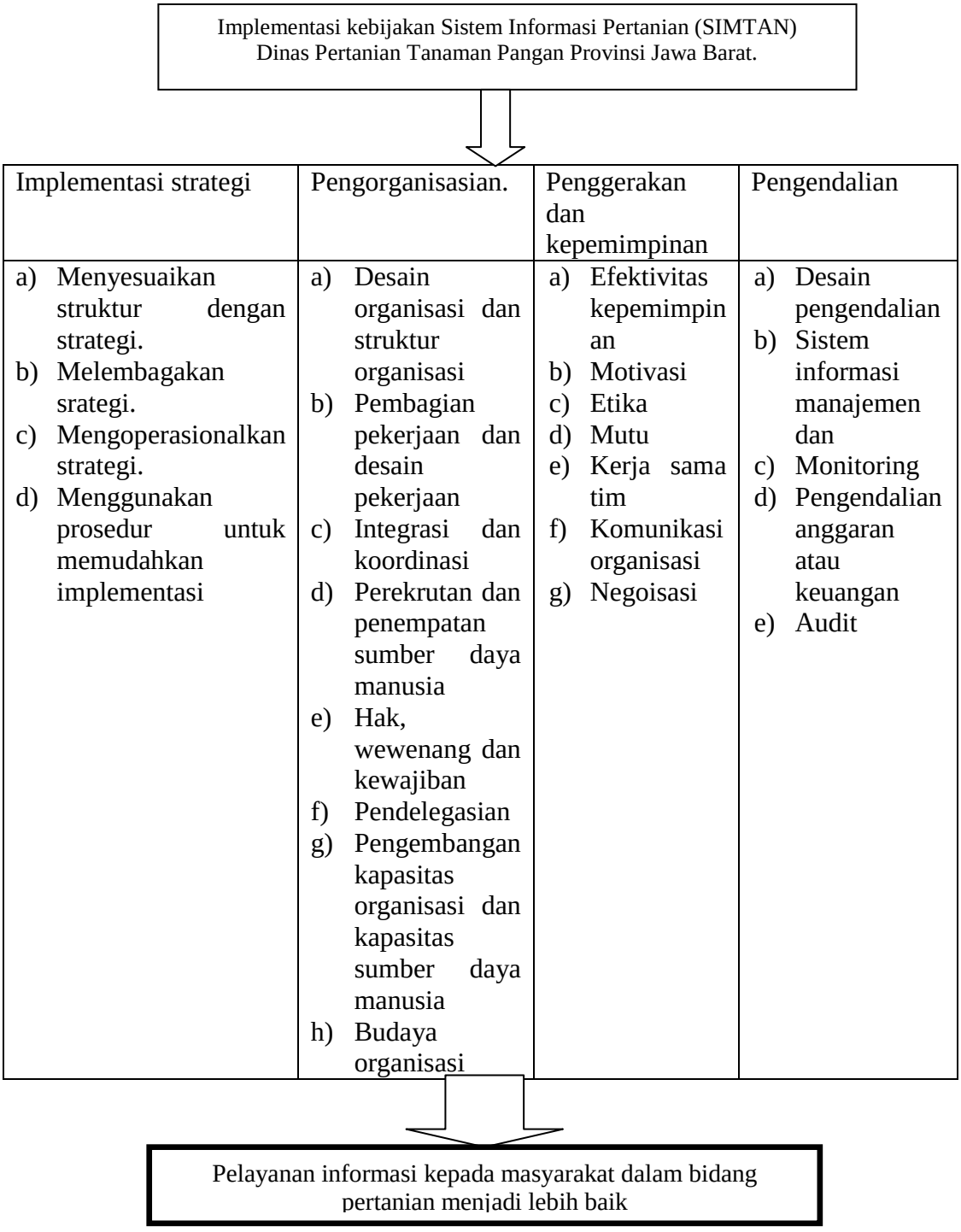
c) Pengendalian anggaran atau keuangan adalah penggunaan anggaran dalam mengatur kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam hal ini kepala Dinas Pertanian

dalam implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi mengenai infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

d) Audit adalah proses system matis yang dilakukan oleh orang yg kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan pertanian dalam hal ini kepala Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi mengenai infrastruktur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Secara singkat, kerangka pemikiran di atas dapat dilihat secara jelas dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.3
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian berguna untuk mengemukakan tata kerja dalam suatu kegiatan penelitian. penelitian ini adalah berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Dikutip dari Mohammad Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* yang mendefinisikan metode deskriptif, sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki" (Nazir, 1998:63).

Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Hal yang sama dikemukakan oleh pendapat Ronny Kountur dalam bukunya *Metode Penelitian* mendefinisikan metode penelitian deskriptif, yaitu:

> "Metode penelitian deskriptif *(descriptive research)* adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti"(Kountur, 2004:105).

Berdasarkan metode yang digunakan, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa gambaran dari jawaban informan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan

suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2005:3). Oleh karena itu, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menekankan pada *generalisasi*, akan tetapi lebih menekankan pada makna.

Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

> "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*".(Sugiyono, 2005:1)

Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Simtan Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, undang-undang dan lainnya yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan simtan tentang infrastruktur, serta data berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka peneliti dapat memperoleh informasi yang diharapkan.
2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui implementasi kebijakan simtan tentang infrastruktur di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan ini terdiri dari:
    a. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan indera penglihatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang berkompenten dalam pelayanan informasi penyediaan informasi pertanian.
    b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai implementasi kebijakan Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengenai infrastruktur.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, buku, majalah dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai implementasi kebijakan Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengenai infrastruktur.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan wawancara Aparatur dan Masyarakat). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Sanapiah Faisal teknik pengambilan sampel purposif adalah:

> "Teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangann tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti". (Faisal, 1996:67).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen pertanian dalam meningkatkan pelayanan informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Pengambilan informan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem informasi

manajemen pertanian dari pegawai Sub Bagian Data dan Informasi Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

A. Informan Aparatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yaitu ada 4 (Lima) Aparatur terdiri dari:

   1. Kepala Dinas Pertanian DR. Ir. Endang Suhendar, Ms, sebagai orang pertama yang dijadikan sumber data. Peneliti memilih karena orang yang dapat memberikan petunjuk untuk mengetahui keseluruhan informasi atau data secara luas mengenai masalah Implementasi Kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang mengenai infrastruktur.
   2. Aparatur sub Bagian Urusan Umum dan Kepegawaian Ibu Kusniawati kertakusuma, SP, Mp, peneliti anggap beliau yang mengetahui keseluruhan informasi atau data secara luas mengenai masalah implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi mengenai insfrastruktur.
   3. Aparatur Sub Bagian Pengadaan Data dan Informasi Bapak Dedi Gunaedi, peneliti ingin mengetahui proses pengadaan dan informasi melalui simtan. Aparatur Sub Bagian Pengadaan Data dan Informasi yang dijadikan informan, karena aparatur Sub Bagian Pengadaan Data dan Informasi merupakan orang yang berwenang dalam memberikan data mengenai Simtan, dan lebih mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Simtan tersebut.

4. Pegawai Sub Bagian Perencanaan dan Program Bapak Supandi, SP.d, STP, peneliti ingin mengetahui mengenai Simtan tentang pertanian. Peneliti memilih Aparatur Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagai informan, karena lebih mengetahui mengenai Simtan dan siap membantu penulis dalam melakukan penelitian di tempatnya.

B. Informan Masyarakat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yaitu ada 2 (dua) masyarakat terdiri dari :

1. Masyarakat pertama yang dijadikan informan adalah Ibu Wati Susilawati, beliau adalah petani yang sedang menanyakan kepada Bagian Seksi Penanganan Mutu Hasil Bapak Ir. Dadan Hidayat, M. Si tentang pemberantasan hama tanaman pangan dan beliau memberikan berbagai informasi yang di butuhkan.
2. Masyarakat kedua yang dijadikan sebagai informan adalah Bapak Jaja yang sedang menanyakan kepada Bagian Seksi Kelembagaan Pertanian Ir. Niknik N Hidayat tentang cara bertani yang baik.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong bahwa:

> "Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

> penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain" (Moleong, 2005: 248).

Sesuai dengan definisi di atas, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan data yang ada. Data dipilih dan dikelola berdasarkan jenisnya. Pola analisis ditentukan berdasarkan temuan data. Setelah dipelajari, maka hasil analisis tersebut disimpulkan. Kesimpulan analisis tersebut merupakan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Menurut Winarno, bahwa analisa data dalam penelitian deskriptif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: dilakukan dengan teknik dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh baik data primer maupun sekunder. Kemudian pengamatan tentang peranan aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir dengan pelengkap wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Penilaian data: pada tahap ini masalahnya adalah validitas dan obyektifitas sehingga perlu melakukan kategorisasi data primer dan sekunder dengan pencatatan serta mereduksi data sekunder, kemudian diseleksi agar relevan dengan masalah penelitian.
3. Interpretasi data: yakni memberikan penilaian (penafsiran), menjelaskan pola atau kategori serta mencari dan menggambarkan hubungan pengaruh antar berbagai konsep. Langkah ini dilakukan berdasarkan pemahaman intelektual dalam arti dibangun berdasar pengamatan empiris. Untuk ini, memerlukan seperangkat konsep yang telah tersusun, yang dalam penelitian ini berupa teori-teori tentang peranan aparatur, kualitas pelayanan publik dan *e-Government*.
4. Menarik kesimpulan atau generalisasi: yaitu ditujukan untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis yang dilakukan, kemudian disusul dengan komentar terhadap hasil kesimpulan.
   (Winarno, 2002:133)

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data. Pengumpulan data primer maupun data sekunder berdasarkan dokumentasi atau penelitian. Penilaian data untuk menyeleksi kategorisasi data

primer atau data sekunder. Interpretasi data dilakukan untuk menafsirkan data-data yang ditemui di lapangan. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan generalisasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Barat Jalan Surapati No.71 Bandung Telepon (022) 2503884, Kode Pos 40133. Adapun waktu penelitian ini berlangsung pada bulan Januari sampai bulan Juli 2010.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2010							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
1.	**Tahap Persiapan**								
	a. Observasi Lokasi Penelitian	■	■	■					
	b. Pengajuan Judul		■	■					
	c. Penyusunan Usulan Penelitian.			■	■				
	d. Seminar Usulan Penelitian						■		
2.	**Tahap Pelaksanaan**								
	a. Pelaksanaan Penelitian			■	■	■	■	■	
	b. Wawancara				■	■	■	■	
	c. Observasi				■	■	■	■	
	d. Studi Kepustakaan			■	■	■			
3.	**Tahap Akhir**								
	a. Penyusunan Skripsi			■	■	■	■	■	
	b. Sidang Skripsi								■